



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INNA KARTIKASARI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 796881

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.475.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 325.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	513.620.710
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.346.620.710



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.346.620.710

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 931264

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.000.000

1. Tanah Seluas 1205 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 105.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. 21.446.450

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.848.404

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.843.676

Sub Total Rp. 549.638.530

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 549.638.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG PITOYO**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **485611**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	525.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 1620 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
3. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.750.000
1. MOTOR, HONDA 01A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOTOR, HONDA CB125 Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000		
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	866.800.000



III. HUTANG

Rp. 280.010.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 586.790.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.